

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kepemerintahan yang baik merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, pelayanan prima, demokrasi, efektifitas, efisiensi, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh rakyat (Peraturan pemerintah No. 101 tahun 2000). *Good government governance* tercermin dalam akuntabilitas keuangan pemerintah, proses pengelolaan keuangan serta penyajian laporan keuangan. Karena menyangkut aspek politik dan ketaatan, aspek sosial serta aspek ekonomi pada peraturan perundang-undangan menjadikan tujuan laporan sektor publik ini lebih rumit dibandingkan sektor swasta. Apakah sudah memberikan pelayanan efektif dan efisien kepada rakyatnya sulit untuk diukur dan dinilai dari laporan keuangan sektor publik.

Fenomena di Indonesia yang terjadi dewasa ini dalam perkembangan sektor publik yaitu tuntutan akuntabilitas dalam lembaga-lembaga publik, baik daerah maupun pusat yang semakin kuat. Akuntabilitas merupakan kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya yang wajib untuk dipertanggungjawabkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik Stanbury (Rahmawati, 2017). Dengan menyampaikan laporan

keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban maka transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan

pemerintah daerah dan pusat dapat terwujud.

Berbagai fenomena yang peneliti temukan ternyata masih banyak beberapa kelemahan di dalam laporan keuangan pemerintah di Indonesia, dari adanya fenomena laporan keuangan pemerintah di Indonesia tersebut menarik untuk diuji atau dianalisis lebih lanjut, fenomena yang berhasil dihimpun dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu berikut ini:

Kelemahan di dalam sistem pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan antara lain berupa pencatatan transaksi yang tidak akurat atau bahkan transaksi yang tidak di catat, aset tetap yang belum di inventarisasi hingga pencatatan persediaan yang tidak tertib, kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. Hal ini tentu akan menyulitkan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPKD) dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah yang andal.

Dari fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak ketidaksesuaian laporan keuangan pemerintah dengan peraturan dan masih terdapat penyimpangan yang ditemukan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), membuat tuntutan masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan audit laporan keuangan harus lebih baik (*good governance government*) meningkat, hal ini tentunya mendorong pemerintah daerah dan pusat menerapkan akuntabilitas publik.

Laporan keuangan yang berkualitas didukung oleh salah satu faktornya yaitu sistem informasi akuntansi, proses yang didasarkan pada input yang baik, proses yang baik dan output yang baik maka dapat menghasilkan

laporan keuangan berkualitas. Sistem informasi akuntansi adalah tanggung jawab sub sistem atau komponen dari suatu organisasi atas penyajian informasi keuangan dalam pembuatan keputusan untuk membantu manajemen (Kurniawan, 2011). Sebuah organisasi dalam setiap manajemen memerlukan informasi berbeda-beda sesuai wewenang dan tanggungjawab masing-masing. Semakin rendah informasi kegiatan yang rincikan tingkat manajemen yang melakukan operasi maka semakin tinggi tingkat manajemen membutuhkan informasi yang lebih ringkas. Jika dihasilkan dari laporan keuangan yang berkualitas, informasi akuntansi yang dihasilkan juga akan berkualitas, sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Tuntutan di bagian akuntansi yaitu menghasilkan informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan. Bila manajemen sudah mempertimbangkan semua faktor maka manajemen akan mempunyai resiko kesalahan yang lebih kecil dalam pengambilan keputusan.

Tuntutan profesionalitas pengelolaan keuangan negara oleh Reformasi Keuangan Negara tahun 2003 mengharuskan dan mengingatkan bahwa proses akuntansi menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kemudian diaudit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dan disampaikan ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) I Gde (Silviana dan Antoni, 2014). Rata-rata penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP No.24 Tahun 2005 Roesyanto (Saputra, 2015).

Hal lain yang mungkin dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Peraturan Pemerintah

No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah telah mengatur kewajiban pemanfaatan teknologi informasi didalam pemerintah daerah dan pusat. Teknologi informasi merupakan penggunaan teknologi untuk mendapatkan, mengolah data, menyusun, memproses, menyimpan dan berbagai cara memanipulasi data agar memperoleh informasi berkualitas yaitu informasi yang akurat, tepat waktu dan relevan untuk digunakan dalam bisnis, pemerintahan dan keperluan pribadi (Rusdiana dan Irfan, 2014). Selain teknologi informasi sebagai alat pemroses dan penyimpan informasi (teknologi komputer/*software and hardware*) juga berfungsi sebagai alat untuk penyebaran informasi (teknologi komunikasi).

Akan tetapi, implementasi teknologi informasi tersebut menjadi sangat mahal jika tidak dimanfaatkan dengan optimal Indriasari dan Nahartyo (Rahmawati, 2017). Hal tersebut terkait penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras, keterbatasan dana untuk mengimplementasikan teknologi informasi dan kendala lainnya adalah kondisi SDA (sumber daya manusia) tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kendala tersebut mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintahan. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi inilah yang mungkin akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, di antaranya Silviana dan Antoni (2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan penerapan sistem

informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun Saputra (2015) mempunyai hasil berbeda bahwa penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yaitu Armel (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun Riandani (2017) mempunyai hasil berbeda bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor lainnya yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Armel (2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun Inapty dan Martiningsih (2016) juga mempunyai hasil yang berbeda bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan inilah yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Silviana dan Antoni (2014) mengenai pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada (1) menambahkan dua variabel penerapan standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen, karena standar akuntansi pemerintah adalah kekuatan hukum sebagai

persyaratan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia dan teknologi informasi adalah hal yang sangat penting untuk kemampuan perusahaan atau organisasi serta menentukan daya saing dalam meningkatkan kinerja dimasa mendatang (2) objek penelitian sebelumnya yaitu Pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2014 berbeda dengan penelitian ini pada SKPD Grobogan tahun 2017, karena Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian selama lima tahun berturut-turut (BPK RI, 2014). Permasalahan yang ditemukan terkait dengan pencatatan dan pengamanan aset belum memadai, pengendalian internal atas persediaan pada beberapa SKPD belum dilaksanakan dengan tertib, penyajian piutang dan aset lainnya dari tagihan penjualan angsuran yang tidak didukung rincian data yang memadai dan realisasi dana BOS tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian diatas peneliti mencoba untuk meneliti bagaimana Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhdap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Grobogan)

1.2 Rumusan Masalah

Fungsi yang sangat vital dalam laporan keuangan pemerintah yaitu menggambarkan kondisi keuangan pemerintah dan untuk mewujudkan akuntabilitas. Tuntutan profesionalitas pengelolaan keuangan negara mengingatkan bahwa proses akuntansi yang dibantu dengan teknologi informasi

harus menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kemudian diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi (Silviana dan Antoni, 2014; Saputra, 2015; Juwita, 2013), Standar Akuntansi Pemerintah (Armel 2017; Triwardana, 2017; Inapty dan Martiningsih, 2016; Saputra, 2015; Juwita, 2013) dan Teknologi Informasi (Armel, 2017; Riandani, 2017)

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 2) Bagaimana penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Dapat menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

- 2) Dapat menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
- 3) Dapat menganalisis dan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat pada beberapa pihak, yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap literatur Akuntansi Pemerintah dan dapat dijadikan sebagai studi lanjutan yang relevan dan bahan kajian dalam menambah pengetahuan tentang pengaruh dari Penerapan sistem informasi akuntansi, standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada SKPD Kabupaten Grobogan tentang pemahaman dan kesadaran dalam menerapkan sistem informasi akuntansi, standar akuntansi pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.